

BOLSA FAMILIA DALAM KERANGKA *WELFARE STATE*: SOLUSI KESEJAHTERAAN ATAU KEBIJAKAN MINIMALIS DI BRASIL

Zahra Hanifah Salma¹⁾, Bella Ola Shakira²⁾, Shandy Gupa Pratama³⁾, Jerry Indrawan⁴⁾, Reja³⁾

^{1),2), 3),4),5)} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia.

e-mail : 2310413071@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾, 2310413069@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾, 2310413133@mahasiswa.upnvj.ac.id³⁾ jerry.indrawan@upnvj.ac.id⁴⁾, reja@upnvj.ac.id⁵⁾

Received: 11-04-2026

Revised: 26-05-2026

Accepted: 22-06-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Bolsa Familia; Welfare State; Social Policy; Poverty Reduction; Brazil.*

This study aims to analyze the Bolsa Família Program within the welfare state framework to determine whether it is more appropriately understood as a welfare solution or merely a minimalist social policy in Brazil. The study is motivated by persistent poverty and social inequality, which have prompted the government to strengthen social protection policies. This research employs a qualitative approach using a literature review of books, scholarly journals, policy documents, and reports from international organizations. The analysis is conducted using the welfare state concept and John Rawls' Theory of Justice. The findings indicate that Bolsa Família has not only contributed to reducing poverty but has also improved access to education, healthcare, and social protection for low-income households through the Conditional Cash Transfer (CCT) mechanism. From Rawls' perspective, the program reflects the implementation of the *difference principle* by directing redistributive benefits to the least advantaged while promoting *fair equality of opportunity* through expanded access to education and healthcare. Nevertheless, the program still faces limitations in addressing structural inequality and fostering long-term social mobility, particularly in transforming deeply rooted patterns of social and economic inequality across generations. This study concludes that Bolsa Família is better understood as a welfare instrument within the welfare state framework rather than merely a minimalist policy, as it demonstrates the state's long-term commitment to providing sustainable social protection for vulnerable groups while promoting greater social justice and more equitable opportunities.

Abstrak.

Studi ini bertujuan menganalisis Program Bolsa Familia dalam kerangka *welfare state* untuk menilai apakah program tersebut lebih tepat dipahami sebagai solusi kesejahteraan atau hanya sebagai kebijakan minimalis di Brasil. Kajian ini berangkat dari masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan sosial yang mendorong negara menghadirkan berbagai kebijakan perlindungan sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan organisasi internasional. Analisis dilakukan menggunakan konsep *welfare state* serta Teori Keadilan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bolsa Familia tidak hanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial melalui mekanisme *Conditional Cash Transfer* (CCT). Ditinjau dari perspektif Rawls, program ini mencerminkan penerapan *difference principle* melalui redistribusi manfaat kepada kelompok yang paling kurang beruntung serta mendukung *fair equality of opportunity* dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, program ini, masih

Kata Kunci: *Bolsa Familia; Welfare State; Kebijakan Sosial; Pengentasan Kemiskinan; Brasil.*

menghadapi keterbatasan dalam mengatasi ketimpangan struktural dan mendorong mobilitas sosial jangka panjang, terutama dalam mengubah struktur ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Studi ini menyimpulkan bahwa Bolsa Familia lebih tepat dipahami sebagai instrumen kesejahteraan dalam kerangka welfare state daripada sekadar kebijakan minimalis karena menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi kelompok rentan serta memperluas keadilan sosial dan kesempatan yang lebih setara.

PENDAHULUAN

Brasil adalah negara terbesar di Amerika Latin dalam segi wilayah maupun jumlah populasi, serta memiliki posisi strategis dalam dinamika politik dan ekonomi global sebagai salah satu negara berkembang dengan pengaruh signifikan. Secara historis, Brasil adalah bekas koloni Portugal yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1822, dan sejak itu telah menjalani berbagai sistem pemerintahan, termasuk monarki dan pemerintahan secara militer, sebelum akhirnya menjadi negara demokrasi dengan sistem presidensial setelah tahun 1985. Brasil merupakan satu negara terbesar di Amerika Latin bukan hanya karena luas wilayahnya dan kekuatan ekonominya, tetapi juga karena karakteristik demografinya yang besar dan kompleks. Menurut data dari Worldometer, Brasil diproyeksikan memiliki lebih dari 213 juta penduduk pada tahun 2026, yang menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia¹.

Sebagai akibat dari sistem ekonomi yang tidak merata dan sejarah panjang ketidakadilan sosial, tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi telah menjadi warisan dari kehidupan masyarakat Brasil sebelum awal tahun 2000-an. Meskipun adanya kebijakan seperti Plano Real dalam stabilisasi ekonomi Brasil pada 1990-an, efeknya tidak terlalu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Sebagian besar orang miskin hidup dalam kondisi rentan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan permukiman informal (favela) di kota-kota besar, dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti sekolah, dokter, dan sanitasi. Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin. Kondisi ini sering dijelaskan sebagai bentuk “eksklusi sosial” yang sistemik, di mana kelompok miskin tidak hanya kekurangan pendapatan tetapi juga terpinggirkan dari akses terhadap peluang sosial dan ekonomi².

Dalam menangani tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial pada masa itu, pemerintah mulai mengembangkan berbagai program bantuan sosial bersyarat di tingkat lokal dan nasional, seperti Bolsa Escola dan Bolsa Alimentação, dengan bentuk Conditional Cash Transfer

¹ Worldometer, *Brazil Population (LIVE)*, <https://www.worldometers.info/world-population/brazil-population/> diakses pada tanggal 16 April 2026.

² Sonia Rocha, *Poverty and Inequality in Brazil: What Has Changed in Recent Decades?*, United Nations Development Programme, 2003.

(CTT) atau transfer tunai bersyarat. Kemunculan Program Conditional Cash Transfer (CCT) di Brasil tidak terjadi secara tiba tiba, melainkan hasil dari evolusi kebijakan sosial yang dimulai pada akhir tahun 1990 an. Program-program ini berfokus pada peningkatan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dengan cara memberikan bantuan tunai yang disertai dengan kewajiban tertentu, seperti mendaftarkan anak ke sekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pada tahun 2003, di bawah pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva, hadir program "*Bolsa Família*" sebagai wujud transformasi dari penggabungan program-program kesejahteraan sosial terdahulu yang berskala nasional.

Bolsa Família adalah salah satu program sosial dengan bentuk transfer tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer* (CCT), yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial dalam struktur masyarakat. Secara umum, *bolsa família* merupakan program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) yang ditujukan bagi rumah tangga sangat miskin, dengan kewajiban memastikan anak bersekolah dan mengakses layanan kesehatan dasar, dengan tujuan lain tidak hanya mengurangi kemiskinan jangka pendek tetapi juga memutus rantai kemiskinan untuk generasi selanjutnya melalui perbaikan tatanan sosial. Oleh karena itu, Bolsa Família bukan hanya program bantuan sosial semata, ini juga adalah instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk menangani kemiskinan dan ketimpangan secara lebih sistematis yang berujung pada kestabilan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang.

Sebagai salah satu program kebijakan CCT terbesar di dunia, Bolsa Família dapat mencakup sekitar seperempat populasi negara tersebut dan telah menginspirasi banyak program serupa di negara berkembang lainnya³. Program ini awalnya diperkenalkan di tingkat kota di kota Campinas dan Brasília pada tahun 1995, kemudian diperluas ke tingkat nasional pada tahun 2001 dengan nama *Bolsa Escola*, dan kemudian digabungkan dengan program transfer tunai lainnya menjadi program *Bolsa Família* pada tahun 2003. Sejak saat itu, program ini telah menjadi program unggulan dari arsitektur kebijakan sosial pemerintah dengan membuktikan bahwa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dapat dicapai melalui penerapan mekanisme bantuan tunai bersyarat yang terintegrasi dengan layanan pendidikan, dan kesehatan⁴.

Memutus siklus kemiskinan antar generasi, memerangi kelaparan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial melalui program transfer tunai dari pemerintah merupakan tujuan dari program Bolsa Família di Brasil. Hal ini sejalan dengan gagasan dari kerangka pengertian tentang

³ Alfredo Saad-Filho, *Social Policy for Neoliberalism: The Bolsa Família Programme in Brazil*, Development and Change 46, no. 6, 2015.

⁴ Kathy Lindert dkk, "*The nuts and bolts of Brazil's Bolsa Família program: Implementing conditional cash transfers in a decentralized context*", World Bank social protection discussion paper 0709. Washington, DC: World Bank. 2007.

Negara Kesejahteraan atau “*welfare state*”. Gagasan negara kesejahteraan, atau “*welfare state*”, mengacu pada penyelenggaraan negara yang berfokus pada perlindungan sosial sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Negara kesejahteraan atau “*welfare state*” sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*), yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaringan keamanan sosial⁵.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Program Bolsa Família menurunkan kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Brasil. Penelitian dari Neves dkk., (2020), menekankan fungsi Bolsa Família sebagai alat untuk memenuhi hak-hak sosial. Di sisi lain, Soares dkk., (2010), dan Oliosi dkk., (2019) menunjukkan seberapa efektif program melalui mekanisme *Conditional Cash Transfer* (CCT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini umumnya terkonsentrasi pada tiga fokus konseptual yaitu, seberapa efektif program pengentasan kemiskinan, analisis bagaimana program tersebut berdampak pada pembangunan modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta kajian tentang implementasi dan tata kelola kebijakan. Tetapi sebagian besar penelitian fokus pada mengukur dampak empiris, sehingga tidak banyak penelitian yang memasukkan Bolsa Família ke dalam diskusi teoritis tentang posisi program tersebut sebagai manifestasi dari sebuah konsep negara kesejahteraan atau mungkin sebagai bentuk kebijakan sosial yang minimalis.

Berdasarkan *gap research* tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program Bolsa Família dapat dipahami dalam kerangka *welfare state* melalui perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil atau hanya menjadi bentuk kebijakan minimalis semata. Dalam perspektif kebijakan sosial, kebijakan minimalis dianggap sebagai intervensi negara yang bersifat residual dan selektif, yang hanya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang paling miskin tanpa mengikuti transformasi yang lebih luas terhadap struktur ketimpangan maupun perluasan hak-hak sosial secara universal. Disisi lain, menurut penelitian dari Elvianti dkk., (2020), menyimpulkan bahwa konsep *welfare state* menempatkan perlindungan sosial sebagai tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi kesejahteraan dan penyediaan hak-hak dasar secara berkelanjutan.

⁵ Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, TRANSPARANSI Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2014.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi ruang kajian yang belum banyak dibahas, seperti analisis posisi teoretis Bolsa Família dalam perdebatan negara kesejahteraan modern dengan menggabungkan ide-ide kebijakan minimalis dan teori keadilan John Rawls. Menurut Rawls (1999), kebijakan redistributif tidak hanya harus dinilai berdasarkan seberapa baik mereka menurunkan kemiskinan, tetapi juga harus mampu memenuhi prinsip perbedaan, yaitu memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang beruntung (*the last advantaged*) sekaligus mewujudkan kesetaraan kesempatan yang adil melalui akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan sosial.

Dari pandangan ini dapat terlihat bahwa meskipun Bolsa Família telah berhasil meningkatkan berbagai indikator kesejahteraan, belum secara otomatis membuktikan bahwa program tersebut secara substansial telah mewakili prinsip *welfare state*, kecuali jika program tersebut mampu mengurangi ketimpangan struktural secara mengakar. Oleh karena itu, jika merujuk pada judul, apakah program ini termasuk ke dalam konsep negara kesejahteraan atau hanya sekedar kebijakan minimalis dapat dilihat melalui program ini tidak hanya tentang efektivitas kebijakan, itu harus dimasukkan ke dalam pembicaraan yang lebih luas tentang apakah program tersebut merupakan bukti komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan atau hanya merupakan adaptasi kebijakan sosial neoliberal yang hanya mengelola kemiskinan tanpa mengubah bentuknya.

Artikel ini berangkat dari argumentasi bahwa keberhasilan Bolsa Família dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas akses terhadap layanan dasar belum secara otomatis menunjukkan bahwa program tersebut telah merepresentasikan prinsip *welfare state* secara menyeluruh. Di satu sisi, program ini dapat dipandang sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan perlindungan bagi kelompok rentan. Namun disisi lain, karakteristik bantuan yang bersifat selektif melalui mekanisme *Conditional Cash Transfer* (CCT) juga memunculkan pandangan bahwa Bolsa Família lebih dekat dengan model kebijakan minimalis yang berfungsi mengurangi dampak kemiskinan tanpa sepenuhnya mengatasi akar ketimpangan yang bersifat struktural. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji apakah Bolsa Família lebih tepat dipahami sebagai solusi kesejahteraan yang mencerminkan praktik *welfare state* atau sebagai kebijakan minimalis yang memiliki keterbatasan dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian politik global dan kebijakan sosial, khususnya dalam memahami bentuk intervensi negara berkembang dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mencari pemahaman mendalam tentang fenomena terkait kebijakan sosial, terutama untuk analisis program Bolsa Familia dalam konteks negara kesejahteraan. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan analisis fenomena yang sedang dipelajari secara sosial. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan diinterpretasikan, dipraktikkan, dan dievaluasi dalam suatu konteks⁶. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi-analitik. Penelitian deskripsi-analitik adalah penelitian yang secara sistematis menggambarkan fenomena yang dipelajari dan secara kritis dianalisis melalui penerapan kerangka teori. Dalam penelitian ini, analisis digunakan dengan bantuan negara kesejahteraan dan teori keadilan John Rawls untuk mempertimbangkan apakah program Bolsa Familia merupakan kebijakan kesejahteraan yang layak dan menyeluruh, atau kebijakan *anti poverty* yang dangkal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini melampaui tingkat deskriptif kebijakan, menuju tingkat normatif dari implikasi kebijakan.

Desain penelitian untuk studi terpilih adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah proses penelitian yang dilakukan dengan menilai sumber literatur terkait topik studi. Ini dapat mencakup buku, jurnal penelitian, laporan studi organisasi internasional, dan literatur kebijakan. Desain ini digunakan karena studi ini berfokus pada analisis konseptual dan teoritis kebijakan publik. Oleh karena itu, pengumpulan data langsung dari lapangan tidak diperlukan⁷. Dengan penelitian kepustakaan, peneliti dapat memperoleh berbagai orientasi dan temuan penelitian sebelumnya mengenai program Bolsa Familia, negara kesejahteraan, dan teori keadilan. Selain itu, desain ini membantu peneliti mengevaluasi fenomena studi dengan data sekunder yang tersedia secara lebih mendalam. Oleh karena itu, studi ini bersifat analitis dan interpretatif yang bertujuan untuk memahami berbagai kebijakan sosial dan menilainya dalam perspektif yang lebih luas.

Data untuk studi ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi, mengenai pengumpulan data dari beberapa sumber tertulis yang berkaitan dengan studi tersebut. Studi ini menggunakan data sekunder yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi seperti Bank Dunia, dan dokumen kebijakan pemerintah tentang program Bolsa Familia. Peneliti juga menggunakan sumber lain seperti artikel akademik dan publikasi terpercaya yang mendukung analisis penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, memastikan bahwa sumber yang

⁶ John W. Creswell, J. David Creswell. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2017)

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

diidentifikasi dikategorikan, dan yang relevan dengan studi terpilih. Dalam studi ini, pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria agar data yang digunakan tetap relevan dan berkualitas. Pertama, sumber yang dipilih berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks, atau dokumen kebijakan resmi yang diterbitkan selama periode pelaksanaan hingga evaluasi program, terutama yang membahas perkembangan Bolsa Familia pada rentang tahun 2013-2023. Kedua, literatur tersebut harus secara khusus mengkaji dampak, desain kebijakan, maupun berbagai kritik terhadap program Bolsa Familia di Brasil. Ketiga, penelitian juga menggunakan data statistik resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, seperti Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dan Bank Dunia.

Untuk memastikan bahwa data sekunder yang digunakan benar-benar valid, studi ini menerapkan teknik triangulasi sumber data. Informasi mengenai efektivitas program Bolsa Familia, seperti penurunan tingkat kemiskinan serta peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, tidak hanya mengacu pada satu sumber. Data tersebut dibandingkan dengan dikonfirmasi kembali melalui proses *cross-examination* antara data kuantitatif makro yang diterbitkan pemerintah Brasil dengan hasil penelitian kualitatif independen dari para akademisi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya bias publikasi sekaligus memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan dari yang tidak berhenti hanya pada pengumpulan data semata, tetapi juga fokus pada konteks makna dari data tersebut⁸. Oleh karena itu, penting membaca sumber secara kritis untuk menentukan validitas dan relevansi data yang ada.

Analisis kualitatif deskriptif-analitik adalah teknik analisis data dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengorganisasi data yang telah dilakukan, diikuti dengan interpretasi data berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Proses analisis terdiri dari beberapa tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan⁹. Pertama, dalam tahap reduksi data, data disederhanakan dan difokuskan pada data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data diorganisasi menjadi narasi linear untuk memudahkan pemahaman tentang fenomena yang diberikan. Tahap puncak dari proses ini adalah pengambilan kesimpulan. Disini, data yang telah dianalisis diinterpretasikan menggunakan konsep negara kesejahteraan dan teori keadilan oleh John Rawls. Dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian yang digunakan adalah

⁸ John W. Creswell, J. David Creswell. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2017).

⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994).

analisis evaluatif yang dapat menjawab pertanyaan penelitian apakah program Bolsa Familia adalah solusi kesejahteraan atau sekadar kebijakan minimal. Selanjutnya, operasional teori dalam studi ini digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis dan membedakan secara jelas dua posisi yang menjadi fokus pembahasan. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator analisis yang disusun berdasarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

- Indikator Welfare State diukur melalui beberapa aspek, yaitu adanya sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, komitmen negara dalam menyediakan anggaran jangka panjang yang tercermin Dari proporsi terhadap PDB, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta upaya memperluas keadilan sosial bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*) sebagaimana dijelaskan dalam Teori Keadilan John Rawls.
- Indikator Kebijakan Minimalis diukur melalui karakteristik bantuan yang bersifat selektif dan residual, yaitu bantuan yang hanya ditujukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tanpa mengubah struktur ketimpangan yang ada. Selain itu, indikator ini juga melihat ketergantungan masyarakat terhadap pasar kerja informal serta sejauh mana kebijakan dijalankan berdasarkan prinsip efisiensi anggaran yang bercorak neoliberal.

Penelitian ini lebih berfokus pada pustaka daripada lapangan, sehingga tidak memiliki lokasi penelitian yang spesifik. Namun, lokus penelitian ini adalah pada kebijakan sosial di Brasil, khususnya, Bolsa Familia. Oleh karena itu, semua informasi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai diskusi dalam literatur mengenai Brasil yang berfokus pada kebijakan sosial, ekonomi, dan publik. Penelitian ini memerlukan beberapa bulan pengerjaan, tepatnya dari bulan Februari hingga Juni 2026. Mulai dari persiapan hingga finalisasi, dimana prosedur penelitian ini meliputi pengumpulan informasi (merancang desain, perumusan masalah, studi literatur), interpretasi data (mengumpulkan data dan menganalisis data), dan penyusunan temuan penelitian hingga menarik kesimpulan. Semua prosedur dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Bola Familia: Integrasi Program ke dalam Model *Welfare State* Brasil

Bolsa Familia adalah salah satu program sosial dengan bentuk transfer tunai bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) terbesar di dunia, yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial dalam struktur masyarakat. Program ini dimulai pada tahun 2003 dengan menggabungkan empat program transfer tunai bersyarat dan tidak bersyarat yang sudah ada dari pemerintah federal Bolsa Escola sebelumnya, Bolsa Familia, program CCT di Amerika Latin, memberikan transfer bulanan bersyarat kepada rumah tangga miskin yang berpenghasilan

kurang dari R\$120 atau sekitar 68 US Dollar per kapita/bulan untuk anak-anak hingga usia tujuh belas tahun atau seorang wanita hamil dengan maksimal dari tiga anak. Pada Desember 2006, Program Bolsa Familia, menjadi salah satu program utama dari kebijakan sosial pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva yang berhasil mencapai target sasaran cakupan populasi sesuai yang ditargetkan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan di Brasil telah menurun secara konsisten sejak 2004, seperti yang ditunjukkan oleh data PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Tahun 2007, bahwa program Conditional Cash Transfer dalam Bolsa Familia secara khusus telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan secara spesifik¹⁰. Karakteristik dasar dan desain Bolsa Familia ini berdasar pada pendapat bahwa transfer pendapatan adalah metode kebijakan sosial yang sah di Brasil. Hal ini didasari karena negara telah mencapai tingkat pendapatan per kapita, yang menjadikan ketimpangan sebagai faktor penjelasan utama keberlanjutan kemiskinan. Dengan kata lain, transfer kecil yang ditargetkan dengan baik memiliki dampak yang signifikan pada ketimpangan pendapatan setiap rakyatnya.

Salah satu cara mengurangi angka kemiskinan juga bisa dilakukan dalam segi memperbaiki salah satu instrumen nya seperti pendidikan, seperti yang tertuang dalam program Bolsa Familia. Guru di setiap sekolah mengumpulkan absensi harian siswa, yang kemudian dikonsolidasikan oleh kepala sekolah dengan daftar penerima manfaat Bolsa Família yang diberikan oleh pemerintah kota kepada sekolah. Setiap dua bulan, pemerintah kota menggabungkan data absensi dan menghitung persentase ketidakhadiran bulanan untuk setiap siswa, lalu mengirimkannya ke Instansi Pendidikan. Walaupun dilakukannya pemantauan pada realisasi program, rata-rata tidak ada rumah tangga yang dikeluarkan dari program karena selalu mematuhi aturan dengan baik¹¹.

Selain instrumen pendidikan, Bolsa Familia juga menyasar instrumen kesehatan sebagai kunci dalam proyeksi mengurangi angka kemiskinan, seperti peningkatan pemanfaatan layanan preventif kesehatan dan peningkatan kesehatan psikososial. Anak-anak penerima manfaat di bawah usia tujuh tahun harus mematuhi ketentuan kesehatan program, yang mencakup vaksinasi dan pemantauan pertumbuhan dalam dua kali setahun. Tidak hanya fokus pada layanan kepada anak-anak di Brasil Bolsa Familia juga memperhatikan aspek kesehatan keluarga seperti mengirim tenaga kesehatan ke komunitas untuk memberikan pelayanan kesehatan primer pada keluarga-keluarga

¹⁰ Brazil - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007.

(<https://webapps.ilo.org/surveyLib/index.php/catalog/7313>, Diakses pada 22 maret 2026 20:17).

¹¹Kathy Lindert dkk, "The nuts and bolts of Brazil's Bolsa Família program: Implementing conditional cost transfers in a decentralized context", World Bank social protection discussion paper 0709. Washington, DC: World Bank. 2007.

bersyarat penerima program yang secara langsung dapat membantu keluarga meraih keuntungan kesehatan yang lebih besar.

Data dari Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE) Per tahun 2015, program Bolsa Familia terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat yang meningkatkan akses masyarakat terhadap kestabilan sosial, akses terhadap pendidikan, dan kesehatan. Data hasil ini menunjukkan bahwa Program Bolsa Familia mendukung 13.827.369 keluarga, dengan masing-masing menerima R\$167,15 setiap bulan. Program ini juga membantu meningkatkan tingkat kelulusan sekolah menengah dari 75,7% menjadi 79,7% dan mengurangi kematian anak akibat masalah gizi buruk dan diare lebih dari 50% dengan biaya 0,5% dari PDB¹². Oleh karena itu, Bolsa Familia bisa dianggap sebagai salah satu contoh kebijakan sosial yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dengan mengkolaborasikan pengentasan kemiskinan dengan pembangunan manusia.

Memutus siklus kemiskinan antar generasi, memerangi kelaparan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial melalui program transfer tunai dari pemerintah merupakan tujuan dari program Bolsa Familia di Brasil. Hal ini sejalan dengan gagasan dari kerangka pengertian tentang Negara Kesejahteraan atau “*welfare state*”. Gagasan negara kesejahteraan, atau “*welfare state*”, mengacu pada penyelenggaraan negara yang berfokus pada perlindungan sosial sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, negara berfungsi bukan hanya sebagai penegak hukum dan keamanan, tetapi juga sebagai penyedia jaminan sosial untuk memastikan hak dasar warga negaranya dipenuhi. Secara singkat, negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya¹³.

Keberhasilan Bolsa Familia dalam meningkatkan capaian pendidikan dan kesehatan tidak hanya menunjukkan efektivitas program dalam menurunkan kemiskinan, tetapi juga dapat dipahami melalui perspektif Teori Keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*). Berdasarkan data IBGE tahun 2015, program ini menjangkau lebih dari 13 juta keluarga penerima manfaat dengan biaya sekitar 0,5 % dari Produk Domestik Bruto¹⁴. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengarahkan sumber daya publik kepada kelompok

¹²Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE), 2015. (ibge.gov.br/en/home-eng.html). Diakses pada 15 Juni, 09:24).

¹³Husodo, S. Y. “Membangun Negara Kesejahteraan”, *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, (2006).

¹⁴Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE), 2015. (ibge.gov.br/en/home-eng.html). Diakses pada 15 Juni, 09:24).

masyarakat yang paling rentan. Menurut Rawls, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*the last advantaged*). Dalam konteks Brasil yang selama bertahun-tahun menghadapi ketimpangan sosial yang tinggi, Bolsa Familia dapat dipandang sebagai bentuk redistribusi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin melalui intervensi negara yang terarah. Selain itu, penerapan syarat (*conditionalities*) berupa kewajiban mengikuti pendidikan dan layanan kesehatan dasar juga dapat dianalisis melalui konsep *fair equality of opportunity* (kesetaraan kesempatan yang adil). Rawls berpendapat bahwa setiap individu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi yang dimiliki. Dalam hal ini, peningkatan tingkat kelulusan sekolah menengah dari 75,7% menjadi 79,7% serta penurunan angka kematian anak akibat gizi buruk dan diare hingga lebih dari 50% menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperluas akses kelompok miskin terhadap pendidikan dan kesehatan. melalui mekanisme tersebut, Bolsa Familia berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan generasi berikutnya memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai upaya negara untuk memperluas akses terhadap kesempatan sosial yang lebih setara.

Dalam konteks filosofis pembentukan *welfare state*, integrasi program Bolsa Familia ke dalam arsitektur kebijakan sosial Brasil sangat selaras dengan pemikiran Jeremy Bentham mengenai prinsip utilitarianisme. Bentham menjelaskan bahwa tanggung jawab moral dan politik utama negara adalah merancang kebijakan publik yang mampu menghasilkan *the greatest happiness of the greatest number* atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang¹⁵. Jika dikaitkan dengan kondisi Brasil, prinsip tersebut dapat terlihat melalui implementasi Bolsa Familia. Dengan alokasi anggaran yang relatif kecil, yaitu sekitar 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah di bawah kepemimpinan Luiz Inácio Lula da Silva mampu menjangkau lebih dari 13 juta keluarga miskin. Melalui program ini, negara tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Efisiensi anggaran yang menghasilkan dampak sosial yang luas tersebut menunjukkan bagaimana intervensi negara dapat mengurangi berbagai bentuk penderitaan sosial, seperti kemiskinan ekstrem dan kerawanan pangan, dalam skala yang besar. Lebih jauh, keberadaan Bolsa Familia dalam kerangka *welfare state* menunjukkan adanya perubahan peran negara di Brasil, dari yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif dalam menangani persoalan sosial. Sejalan

¹⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907)

dengan pemikiran Bentham yang menekankan pentingnya kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,¹⁶ program ini tidak dijalankan sebagai bantuan sementara yang bersifat sukarela, melainkan sebagai kebijakan sosial yang dirancang dan dijalankan secara sistematis oleh negara. Dalam hal ini, negara tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengambil tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang rentan. Bantuan tunai yang dikaitkan dengan kewajiban pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa negara secara aktif berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan dasar yang penting bagi pembangunan manusia. Berdasarkan data yang ditemukan dan teori yang digunakan, Bolsa Familia dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam kerangka *welfare state*. Program ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga berusaha mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Bolsa Familia antara Solusi Kesejahteraan Jangka Panjang atau Kebijakan Minimalis di Brasil

Sejak diimplementasikan secara nasional pada tahun 2003, Bolsa Familia kerap dipandang sebagai salah satu program perlindungan sosial paling berhasil di negara berkembang dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Melalui mekanisme bantuan tunai bersyarat yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan, Bolsa Familia tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat miskin, tetapi juga mendorong peningkatan partisipasi sekolah serta akses terhadap layanan kesehatan dasar. Program ini bergandengan dengan program lain, seperti jaminan pangan, jaminan upah layak, dan dukungan bagi warga di pedalaman. Karena Bolsa Familia hanya salah satu program yang bernaung di bawah visi besar untuk mewujudkan *Brasil Sem Miséria* atau Brasil tanpa kemiskinan¹⁷. Kesuksesan program ini tercermin dari kemampuannya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi bentuk kerentanan sosial yang dialami oleh kelompok masyarakat miskin. Selain memberikan bantuan ekonomi jangka pendek, mekanisme *Conditional Cash Transfer* yang diterapkan juga diarahkan untuk

¹⁶ Richard Titmuss, *Essays on the Welfare State* (London: Allen & Unwin, 1958), hlm. 34–39.

¹⁷ Kathy Lindert dkk, “The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Familia Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context” (World Bank: 2007).

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kewajiban pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat.

Keberhasilan Bolsa Familia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian mendorong munculnya pandangan bahwa program tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi *welfare state* di Brasil. Dalam kerangka *welfare state*, negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, dalam mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan masalah sosial¹⁸. Melalui mekanisme bantuan tunai bersyarat yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan, negara secara aktif hadir untuk mengurangi hambatan sosial dan ekonomi yang selama ini membatasi akses kelompok miskin terhadap layanan dasar. Kehadiran negara dalam program ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai masalah sosial yang memerlukan intervensi kebijakan publik secara sistematis.

Dalam tipologi *welfare state* Esping-Andersen, karakteristik Bolsa Familia menunjukkan pendekatan yang lebih dekat dengan model residual, dimana negara memberikan perlindungan sosial secara terarah kepada kelompok yang paling membutuhkan tanpa sepenuhnya menggantikan mekanisme pasar. Meskipun demikian, perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial melalui program ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan yang melampaui sekadar pemberian bantuan ekonomi. Namun demikian, pengelompokan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan apakah kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, analisis juga perlu dilakukan melalui perspektif normatif untuk menilai sejauh mana Bolsa Familia benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.

Melalui perspektif keadilan John Rawls, kebijakan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan *justice as fairness*, yaitu kondisi ketika institusi sosial dan politik bekerja untuk menciptakan tatanan yang lebih adil bagi seluruh warga negara¹⁹. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus mampu menjamin kebebasan dan kesempatan yang setara bagi setiap individu, sekaligus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat²⁰. Dalam konteks tersebut, Bolsa Familia dapat dipandang sebagai bentuk

¹⁸V. Hadiyono, *Indonesia dalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Vol 1, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, 2020.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

²⁰ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (2022): 45.

redistribusi sosial yang diarahkan untuk memperbaiki posisi kelompok miskin melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prasyarat untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih setara.

Perdebatan mengenai Bolsa Familia tidak hanya berkaitan dengan efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga menyangkut karakter dasar program tersebut sebagai instrumen kebijakan sosial dalam kerangka *welfare state*. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa keberhasilan Bolsa Familia dalam menurunkan angka kemiskinan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa program tersebut mampu mengubah struktur ekonomi dan sosial yang menjadi akar dari kemiskinan itu sendiri. Bolsa Familia pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan sosial yang tetap kompatibel dengan kerangka ekonomi neoliberal karena lebih berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi kelompok paling rentan dibandingkan sebagai sarana redistribusi kekayaan yang lebih luas²¹.

Pada perspektif ini, program Bolsa Familia terbatas dalam mendorong mobilitas sosial ke atas dan jangka panjang, dalam kata lain, program tersebut dipandang berhasil mengurangi kemiskinan, namun belum mampu mengatasi ketimpangan distribusi sumber daya yang telah mengakar dalam masyarakat Brasil. Ketimpangan struktural tersebut tercermin dari masih terbatasnya akses kelompok miskin terhadap kesempatan kerja yang layak, kepemilikan aset produktif, serta layanan publik yang berkualitas, sehingga kemiskinan cenderung terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kritik terhadap Bolsa Familia tidak berfokus pada kegagalan program dalam mengurangi kemiskinan, melainkan pada keterbatasannya dalam mendorong perubahan struktural yang lebih luas. Karena, kesejahteraan yang berkelanjutan dapat tercipta melalui kemajuan sistem perlindungan sosial yang universal dan komprehensif, bukan sekadar melalui mekanisme transfer tunai bersyarat yang ditujukan kepada kelompok tertentu.

Selain faktor kelembagaan, efektivitas program juga dipengaruhi oleh karakteristik penerima manfaat itu sendiri. Meskipun bantuan tunai dan berbagai akses sosial telah disediakan oleh negara, tidak seluruh penerima mampu memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi maupun sosial mereka. Akibatnya, dampak jangka panjang yang dihasilkan program Bolsa Familia dapat bervariasi dan tidak selalu menghasilkan mobilitas sosial yang sama bagi setiap rumah tangga penerima manfaat. Oleh karena itu, kritik terhadap Bolsa Familia tidak semata-mata mempertanyakan efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan, melainkan mempertanyakan sejauh mana program tersebut mampu mentransformasikan struktur

²¹ Alfredo Saad-Filho, *Social Policy for Neoliberalism: The Bolsa Familia Programme in Brazil*, Development and Change 46, no. 6, 2015.

sosial yang selama ini mereproduksi kemiskinan dan ketimpangan di Brasil. Selama intervensi negara masih berfokus pada perlindungan kelompok rentan tanpa diikuti perluasan kesempatan ekonomi dan penguatan layanan publik yang bersifat universal, maka perdebatan mengenai Bolsa Familia sebagai instrumen *welfare state* atau sekadar kebijakan minimalis akan tetap menjadi isu yang relevan.

Terlepas dari beberapa kritik yang ada, salah satu cara untuk menilai apakah Bolsa Familia hanya kebijakan minimalis atau benar-benar instrumen kesejahteraan adalah dengan melihat kemampuannya bertahan ketika menghadapi berbagai krisis sosial, ekonomi, dan politik selama tahun 2013-2023. Periode tersebut menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana program mampu bertahan di tengah perubahan kondisi nasional, mulai dari perdebatan ekonomi akibat mahalnya biaya hidup dan minimnya layanan publik, anggaran besar yang dihabiskan untuk Piala Dunia 2014, resesi terburuk dalam sejarah yang terjadi pada 2015, krisis politik yang berujung pada pemakzulan Dilma Rousseff pada tahun 2016, kebijakan penghematan fiskal pada masa pemerintahan Michel Temer, hingga pandemi COVID-19 yang memperburuk kerentanan sosial masyarakat Brasil. Dalam situasi tersebut, kebutuhan terhadap perlindungan sosial justru semakin meningkat dan mendorong pemerintah untuk mempertahankan mekanisme transfer pendapatan bagi kelompok rentan.

Selanjutnya, pemerintah Brasil meluncurkan program bantuan darurat (*Auxílio Emergencial*) pada masa pandemi untuk menjangkau puluhan juta warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan orientasi politik dari pemerintah satu ke lainnya, instrumen transfer pendapatan tetap menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan sosial negara. Keberlanjutan program di tengah pergantian rezim politik dan berbagai tekanan ekonomi menunjukkan bahwa Bolsa Familia telah mengalami institusionalisasi sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial Brasil, bukan sekadar program bantuan yang bersifat sementara. Dalam perspektif *welfare state*, ketahanan suatu kebijakan sosial atau *policy resilience* menjadi indikator penting bahwa negara memandang perlindungan sosial sebagai fungsi yang bersifat permanen. Di sisi lain, sejumlah keterbatasan yang dikemukakan para kritikus tetap relevan. Karena menyebabkan penerima ketergantungan pada persyaratan kesehatan dan pendidikan, penempatan kerja yang tidak tetap diikuti belum optimalnya integrasi penerima manfaat ke dalam pasar kerja formal²². Namun, kemampuan program untuk terus bertahan dan beradaptasi di tengah krisis menunjukkan

²² Alfredo Saad-Filho, *Social Policy for Neoliberalism: The Bolsa Familia Programme in Brazil*, Development and Change 46, no. 6, 2015.

bahwa Bolsa Familia memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekedar kebijakan penanggulangan kemiskinan jangka pendek.

Dinamika pelaksanaan Bolsa Familia menunjukkan bahwa perdebatan antara solusi kesejahteraan dan kebijakan minimalis tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan secara mutlak. Berbagai capaian yang dihasilkan melalui program ini, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta kemampuannya bertahan di tengah krisis ekonomi, pandemi COVID-19, dan pergantian rezim politik menunjukkan bahwa Bolsa Familia memiliki kontribusi nyata dalam memperluas perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa program ini telah menjalankan fungsi-fungsi penting *welfare state* melalui intervensi negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kelompok masyarakat yang paling rentan. Selain itu, jika dianalisis melalui perspektif keadilan Rawls, kebijakan ini juga mencerminkan upaya negara untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok yang berada pada posisi kurang beruntung dalam struktur sosial. Meskipun demikian, berbagai kritik mengenai keterbatasan program dalam mengatasi ketimpangan struktural tetap relevan untuk diperhatikan. Ketergantungan pada bantuan sosial, belum meratanya kesempatan kerja, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa Bolsa Familia belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan yang bersifat struktural.

Namun, keterbatasan tersebut tidak serta-merta mengurangi signifikansi program sebagai instrumen perlindungan sosial yang berkelanjutan. Jika ditinjau melalui kerangka *welfare state*, keberhasilan suatu kebijakan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuannya menghapus seluruh bentuk ketimpangan struktural, tetapi juga oleh kapasitas negara dalam menjamin perlindungan sosial secara berkelanjutan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks tersebut, keberhasilan Bolsa Familia mempertahankan fungsi perlindungan sosial lintas rezim politik dan berbagai periode krisis menjadi indikator bahwa program ini telah berkembang sebagai bagian dari sistem kesejahteraan negara, bukan sekedar respons kebijakan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa Bolsa Familia lebih tepat dipahami sebagai solusi kesejahteraan jangka panjang dalam kerangka *welfare state* dibandingkan sebagai kebijakan minimalis semata, karena program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara tetapi juga menunjukkan kapasitas yang kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat selama berbagai periode krisis dan perubahan politik. Adapun penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap posisi Bolsa Familia dalam perdebatan antara solusi kesejahteraan atau kebijakan minimalis, sehingga belum dapat membahas secara lebih mendalam berbagai bentuk dampak

kesejahteraan jangka panjang yang dihasilkan program tersebut terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun mobilitas antargenerasi masyarakat Brasil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bolsa Familia lebih tepat dipahami sebagai solusi kesejahteraan dalam kerangka *welfare state* daripada sekadar kebijakan minimalis. Melalui bantuan tunai bersyarat yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan, program ini tidak hanya berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas perlindungan sosial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis konseptual dan belum mengkaji secara mendalam mengenai dampak panjang program Bolsa Familia terhadap mobilitas sosial, ketimpangan struktural, dan kesejahteraan antargenerasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi aspek-aspek tersebut secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Athiq, U. (2014). Kebijakan program bantuan langsung sementara masyarakat ditinjau dari konsep negara welfare state. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 306–324.
- Brazil population (2026) - Worldometer.* (n.d.). <https://www.worldometers.info/world-population/brazil-population/?os=io...%5B0&utm>
- Bolsa Família is Brazil's largest conditional cash transfer program seeking to break intergenerational poverty - Pathfinders.* (2024, February 6). Pathfinders. <https://www.sdg16.plus/policies/bolsa-familia-is-brazils-largest-conditional-cash-transfer-program-seeking-to-break-intergenerational-poverty/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Elviandri, E., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). *Quo vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia*. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252–266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1.

- Husodo, S. Y. (2006), *“Membangun Negara Kesejahteraan”*, *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Lavinas, L. (2013). 21st century welfare. *New left review*, 84(6), 5-40.
- Lindert, K. & Schady, N. (2009). *The Nuts and Bolts of Brazil's Bolsa Família Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context*. Washington, DC: World Bank.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Neves, J. A., Vasconcelos, F. de A. G. de, Machado, M. L., Recine, E., Garcia, G. S., & Medeiros, M. A. T. de. (2020). *The Brazilian cash transfer program (Bolsa Família): A tool for reducing inequalities and achieving social rights in Brazil*. Global Public Health. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1850828>
- Nusantara, R. H. G., & Harahap, N. T. H. (2025). Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Oliosio, J. G. N., Reis-Santos, B., Locatelli, R. L., Sales, C. M. M., da Silva Filho, W. G., da Silva, K. C., Sanchez, M. N., de Andrade, K. V. F., de Araújo, G. S., Shete, P. B., Pereira, S. M., Riley, L. W., Lienhardt, C., & Maciel, E. L. N. (2019). *Effect of the Bolsa Família Programme on the outcome of tuberculosis treatment: A prospective cohort study*. The Lancet Global Health, 7(2), e219–e226. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30478-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30478-9)
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice: Revised edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rocha, S. (2003). *Poverty and Inequality in Brazil: What Has Changed in Recent Decades?* United Nations Development Programme (UNDP).
- Saad-Filho, A. (2015) ‘*Social policy for neoliberalism: the Bolsa Família programme in Brazil*’, *Development and Change*, 46, 6, 1227–52.
- Sunaryo, S. (2022). Konsep fairness John Rawls, kritik dan relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001-022.
- Suryono, A. (2018). *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

- Soares, F. V., Ribas, R. P., & Osório, R. G. (2010). *Evaluating the impact of Brazil's Bolsa Família: Cash transfer programs in comparative perspective*. Latin American Research Review, 45(2), 173–190. <https://doi.org/10.1353/lar.2010.0017>.
- Soares, S et.al. (2010). *Dampak manfaat Program Bolsa Família terhadap ketimpangan dan kemiskinan*. Dalam Jorge Abrahão Castro dan Lúcia Modesto (Ed.) Bolsa Família 2003 – 2010: kemajuan dan tantangan, v. 2 (hlm. 27 - 529), Brasília: IPEA.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.